

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka didalam penulisan penelitian ini adalah di dasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung kajian teori-teori dan sumber kepustakaan yang dapat menjelaskan perumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dibawah ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan kemudian dianalisis dilihat dari pokok permasalahan, teori, dan metode sehingga dapat di ketahui letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Fokus	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
Tanti Sulisti (2019) Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesiapan Pelaku Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Micro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM)	Analisis pemahaman dan kesiapan pelaku UMIKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM	Kualitatif	Untuk kesiapan pelaku UMKM dalam penerapan SAK EMKM sebagai laporan keuangan dalam hal ini di tinjau dari indikator persepsi dan sarana pendukung, dapat di katakan bahwa pelaku UMKM di kota Bandar Lampung cukup siap untuk membuat laporan keuangan yang berdasarkan SAK EMKM.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang kesiapan UMKM dalam penerapan SAK EMKM. Perbedaan : Objek penelitian dan tahun

<p>Disa santrina Lucindawati, Elfa nur aina, Eli Astuti. (2020) Analisis kesiapan UMKM batik di kota madiun dalam penerapan SAK EMKM.</p>	<p>kesiapan dan pemahaman UMKM Batik dalam penerapan SAK EMKM kota Madiun.</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>UMKM batik kota Madiun belum siap dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Untuk itu apabila pemerintah mewajibkan regulasi tersebut bagi pelaku UMKM, perlu di berikan dampingan secara intensif. Hal ini di karenakan UMKM batik di kota Madiun masih melakukan penyusunan laporan keuangan secara tradisional sehingga belum sesuai dengan standar yang berlaku.</p>	<p>Persamaan : Sama-sama meneliti tentang kesiapan UMKM dalam penerapan SAK EMKM.</p> <p>Perbedaan : Objek penelitian dan tahun</p>
--	--	-------------------	--	---

<p>Lailan Azizah Pukungan (2019) Analisis Pemahaman Dan Kesiapan Pengelolah UMKM Dalam Implementasi Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM.</p>	<p>Kesiapan UMKM Dalam Implementasi laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Kesiapan pengelola UMKM baik usaha mikro maupun usaha kecil dalam implementasi laporan keuangan berbasis SAK EMKM yang ditinjau dari indikator persepsi dan fasilitas pendukung, bahwa pelaku UMKM tersebut di Kec.Medan Denai adalah tidak siap. Ini dapat terlihat dari tingkat ketidak siapannya yaitu mikro 56.52% dan kecil sebesar 46% untuk membuat laporan keuangan yang berdasarkan pada SAK EMKM. Dapat juga ditarik kesimpulan dari hasil penyebaran kuisisioner dalam penelitian ini bahwa persepsi pengelola UMKM untuk menerapkan SAK EMKM juga dipengaruhi oleh besarnya omzet yang diterima, semakin kecil omzet perusahaan maka semakin tinggi tingkat ketidaksiapan pelaku UMKM untuk menerapkan SAK EMKM, ini dikarenakan masih adanya persepsi bahwa catatan keuangan suatu hal yang rumit dan tidak ada pengaruhnya bagi usaha mereka.</p>	<p>Persamaan : Sama-sama meneliti tentang kesiapan UMKM dalam penerapan SAK EMKM.</p> <p>Perbedaan : Objek penelitian dan tahun</p>
---	---	-------------------	--	---

<p>Rachma Agustina (2019) Implementasi SAK ETAP Dan SAK EMKM Pada UMKM Di Kawasan Religi PP. TEBUIRENG JOMBANG.</p>	<p>Pengaruh SAK ETAP Dan SAK EMKM Pada PP. TEBUIRENG JOMBANG.</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>UMKM Religi Wisata Pondok Pesantren Tebuireng Jombang hanya variabel lama yang menunjukkan pengaruh terhadap implementasi SAK ETAP dan SAK EMKM, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi SAK ETAP dan SAK EMKM, sehingga dapat disarankan diperlukan sosialisasi yang lebih terarah dan penelitian terhadap UMKM di Wisata Religi Pondok Pesantren Tebuireng Jombang tentang penerapan SAK ETAP dan SAK EMKM mengingat pentingnya UMKM memiliki pencatatan keuangan yang tepat dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.</p>	<p>Persamaan : Sama-sama meneliti UMKM.</p> <p>Perbedaan : Objek penelitian dan tahun</p>
---	---	-------------------	--	---

Rifky Rahadiansyah (2018) PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM KERIPIK TEMPE ROHANI SANAN KOTA MALANG	Analisis UMKM Kripik Tempe Rohani Sanan dalam penerapan SAK EMKM.	Kualitatif	Hasil analisis penerapan standar akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyajian laporan keuangan pada UMKM keripik tempe Rohani Sanan Kota Malang dapat diketahui bahwa dalam proses pencatatan yang dilakukan Kripik Tempe Rohani tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan, kondisi ini menjadikan informasi yang diberikan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan tidak dilakukan secara jelas sehingga menentukan jumlah.	Persamaan : Sama-sama meneliti UMKM Perbedaan : Objek penelitian dan tahun
---	---	------------	--	---

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian UMKM

UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literature menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun kriteria Usaha Mikro sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut:
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 13 kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapun kriteria Usaha kecil sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Adapun kriteria usaha menengah berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

2.2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba-rugi atau *income statement* atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen dan membantu dalam pengambilan keputusan.

2. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selama beroperasi tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Misalnya, jika pada periode berjalan perusahaan mengalami kerugian

maka modal akan berkurang. Sebaliknya jika perusahaan mengalami keuntungan, modal akan bertambah.

3. Laporan Posisi Keuangan

Seperti namanya laporan posisi keuangan (neraca) atau *balance sheet* merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, kamu akan melihat informasi tentang aset, kewajiban dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya tiga akun tersebut.

4. Laporan Arus Kas

Jenis laporan keuangan yang ke empat yakni laporan arus kas atau *cash flow statement*. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun, catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan. Sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan skala besar atau perusahaan yang sudah terbuka (*public companies*). Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan

keuangan lainnya. Sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri.

2.2.3 Laporan Keuangan Sesuai Dengan SAK EMKM

Pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk diterapkan pada entitas kecil maupun entitas menengah. Kemudian, DSAK IAI menerbitkan kembali standar terbaru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM memuat peraturan akuntansi yang lebih sederhana daripada SAK ETAP karena mengatur transaksi yang dilakukan oleh EMKM dengan pengukuran yang menggunakan biaya historis. SAK EMKM diharapkan dapat digunakan bagi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan sumber pendanaan (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, 2016).

Oleh karena itu, DSAK IAI melakukan pengembangan dalam hal standar akuntansi. Standar akuntansi yang baru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan UMKM dengan membentuk kelompok kerja yang melibatkan asosiasi industri, regulator, serta pihak – pihak yang berkepentingan dalam menghadirkan SAK dan dapat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Pada akhir tahun 2016, DSAK IAI mengesahkan Exposure Draft SAK EMKM dan akan berlaku efektif per 1 Januari 2018 sebagai upaya untuk mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana

daripada SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM dan dasar pengakuannya menggunakan biaya historis.

SAK EMKM ini bisa digunakan suatu entitas maupun usaha yang kriterianya memenuhi dari kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Didalam SAK-EMKM, laporan keuangan disusun menggunakan asumsi basis accrual dan kelangsungan usaha SAK EMKM, laporan keuangan minimal terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.

- a. **Aset** adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
- b. **Liabilitas** adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. **Ekuitas** adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya

Dalam SAK EMKM dijelaskan bahwa Laporan Posisi Keuangan pada umumnya mencakup akun-akun berikut ini:

- a. kas dan setara kas.
- b. Piutang.
- c. Persediaan.
- d. Aset tetap.
- e. Utang usaha.
- f. Utang bank.
- g. Ekuitas.

SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan. Contoh format Laporan Posisi Keuangan untuk UMKM berdasarkan SAK EMKM :

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8			
ASET	Catatan	20X8	20X7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
Jumlah kas dan setara kas		xxx	xxx
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS		xxx	xxx

Gambar 2.1 Laporan Posisi Keuangan

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi menyajikan informasi kinerja keuangan entitas yang mencakup Penghasilan dan Beban.

- a. **Penghasilan (*income*)** adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- b. **Beban (*expenses*)** adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

- a. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya: penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.
- b. Keuntungan mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya: keuntungan dari pelepasan aset

Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian.

- a. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan.
- b. Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari

pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset.

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut:

- a. pendapatan;
- b. beban keuangan;
- c. beban pajak

Berikut contoh format laporan laba rugi berdasarkan SAK EMKM :

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8			
PENDAPATAN	Catatan	20X8	20X7
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Gambar 2.2 Laporan Laba Rugi

3. Catatan atas laporan keuangan memuat:
 - a. suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM.

- b. ikhtisar kebijakan akuntansi.
- c. informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Berikut contoh format Catatan Atas Laporan Keuangan untuk UMKM berdasarkan SAK EMKM:

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8		
1. UMUM	Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.	
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING		
a. Pernyataan Kepatuhan	Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.	
b. Dasar Penyusunan	Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.	
c. Piutang Usaha	Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.	
d. Persediaan	Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i> . <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.	
e. Aset Tetap	Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.	
f. Pengakuan Pendapatan dan Beban	Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.	
g. Pajak Penghasilan	Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.	
3. KAS		
Kas kecil Jakarta – Rupiah	20X8 xxx	20X7 xxx

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8		
4. GIRO		
	20X8	20X7
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
5. DEPOSITO		
	20X8	20X7
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku bunga – Rupiah	4,50%	5,00%
6. PIUTANG USAHA		
	20X8	20X7
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA		
	20X8	20X7
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
8. UTANG BANK		
<p>Pada tanggal 4 Maret 20X8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.</p>		
9. SALDO LABA		
<p>Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.</p>		

Gambar 2.3 Catatan Atas Laporan Keuangan

2.2.4 Indikator Kesiapan SAK EMKM

Kesiapan implementasi SAK EMKM akan dinilai melalui beberapa indikator yaitu sumber daya manusia, sarana pendukung, dan komitmen organisasi. Nasution *et al* (2016) dalam penelitiannya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual dengan komitmen SKPD sebagai variabel moderating pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara memaparkan definisi operasional dan indikator terkait variabel penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan indikator tersebut dengan penyesuaian sesuai konteks dalam penelitian ini.

Tabel. 2.2
Indikator Kesiapan SAK EMKM

Indikator	Definisi Oprasional	Sub-Indikator
Sumber Daya Manusia	Kemampuan sumber daya manusia secara individu yang memiliki tugas untuk mencapai tujuan organisasi untuk implementasi SAK EMKM.	1. Tingkat pendidikan 2. Pemahaman akuntansi 3. Pengalaman
Sarana Pendukung	Ketersediaan dan kelengkapan sarana pendukung untuk menunjang keberhasilan dalam implementasi SAK EMKM.	1. Hardware 2. Software 3. Jaringan
Komitmen Organisasi	Sikap yang tangguh dan memegang prinsip kuat untuk keberhasilan dalam implementasi SAK EMKM.	1. Kepedulian terhadap perkembangan UMKM 2. Kesediaan bekerja ekstra untuk kemajuan UMKM

Sumber : Peggy Indianty (2018)

2.3 Kerangka Dasar Konseptual

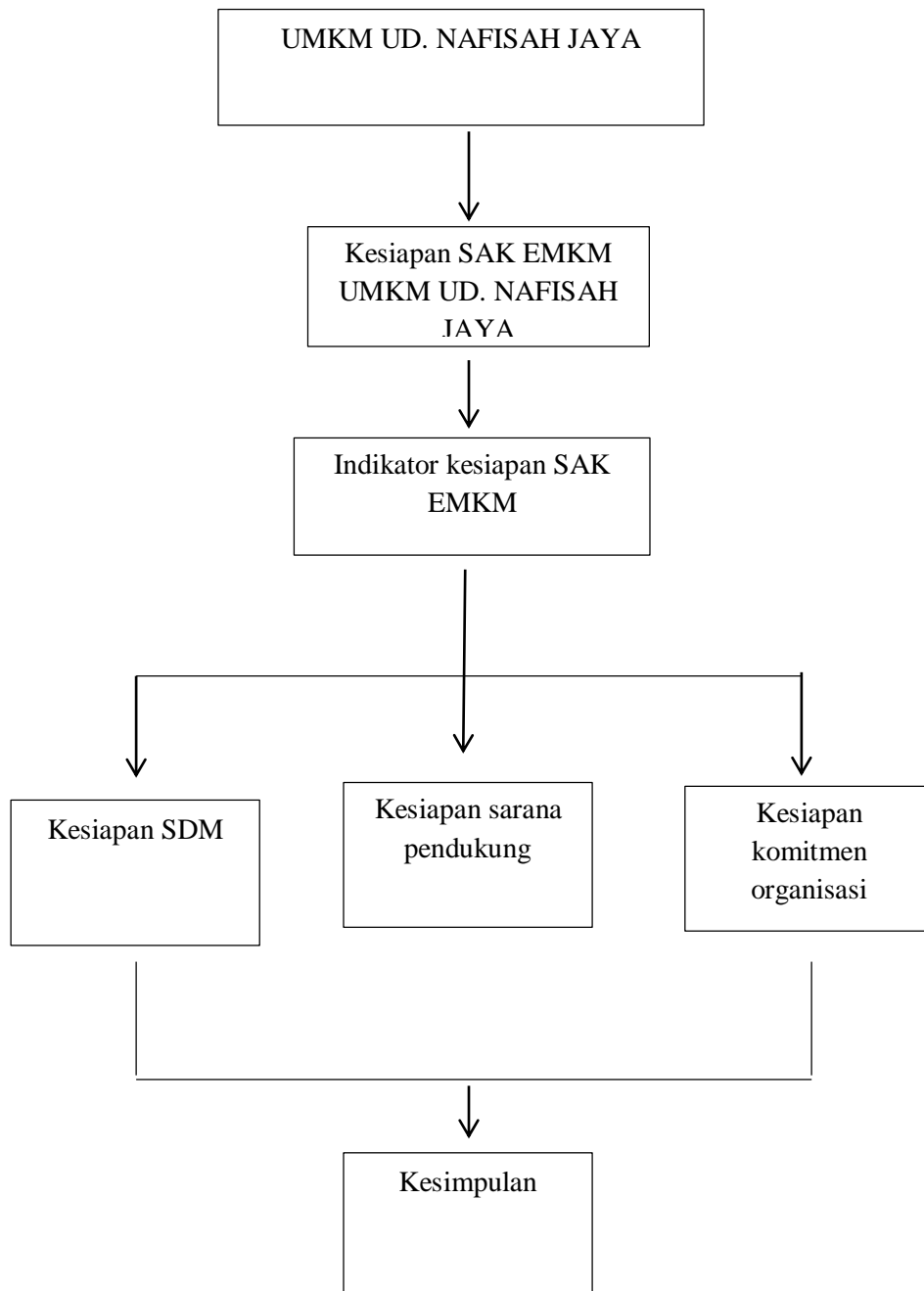
SAK EMKM merupakan standar yang disusun untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Hingga saat ini, berdasarkan pada data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat 64,19 juta UMKM. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,07%. Kontribusi UMKM terhadap

perekonomian Indonesia juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada. Keberadaan UMKM juga dapat mengumpulkan sekitar 60,4% dari total investasi. Sayangnya, Saragih dan Surikayanti (2015) dalam hasil penelitiannya memberikan kesimpulan pelaku UMKM masih kurang memahami akuntansi dan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, perlu dirancang suatu desain baru untuk mempermudah para pengusaha. Desain akuntansi yang mudah dipahami pelaku UMKM juga diperlukan untuk memenuhi kewajiban pajak. Pasalnya, pelaku UMKM tidak selamanya dapat mengandalkan pencatatan. Ada batas waktu tertentu untuk UMKM beralih ke rezim pemajakan umum yang perlu pembukuan. Pembukuan juga menjadi salah satu unsur penting bagi pengusaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan keuangan yang akurat akan memudahkan pengusaha untuk mengetahui pajak terutang mereka. Dengan demikian, kesalahan hitung atas pajak terutang dapat dihindari. Dengan demikian, diperlukan suatu sistem yang lebih sederhana tetapi komprehensif. Suatu sistem yang mampu untuk mengakomodasi kebutuhan akuntansi dan perpajakan para pelaku UMKM.

SAK EMKM adalah suatu standar yang disusun oleh IAI untuk memenuhi persyaratan akuntansi dalam pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (EMKM) (IAI, 2021). Standar ini diperuntukan bagi pengusaha yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi dalam SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Perincian lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang bisa menggunakan SAK EMKM dapat dilihat di dalam Undang-Undang (UU) No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasalnya, peraturan tersebut menjelaskan

pendefinisian dan pengelompokan rentang kuantitatif EMKM secara komprehensif. Pengaplikasian SAK EMKM selama 2 tahun berturut-turut dalam laporan keuangan entitas disusun dengan menggunakan basis dasar akrual dan kelangsungan usaha. Basis ini menggunakan konsep entitas bisnis dan diterapkan pada entitas selain EMKM. Mengingat target pengusahanya adalah pemilik entitas menengah-kecil, SAK EMKM dirancang menjadi suatu standar yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Laporan berbasis standar ini hanya meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. SAK EMKM tidak dengan spesifik mengatur format atau urutan akun-akun yang disajikan. Paling tidak dengan SAK ini, para pengusaha dapat memuat aset, likuiditas, dan liabilitas berdasarkan pada waktu jatuh tempo dalam laporan posisi keuangannya. Selanjutnya, laporan laba rugi dapat memuat seluruh laba dan rugi yang telah diakui dalam satu periode. Seperti laporan akuntansi pada umumnya, data yang disajikan merupakan data untuk satu periode. Salah satu tujuan SAK EMKM adalah meningkatkan literasi keuangan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Diharapkan terjadi pergeseran sistem laporan keuangan para entitas, dari semula masih berbasis kas, dapat perlahan berganti menjadi basis akrual. SAK EMKM juga dirancang sedemikian rupa untuk memperingkas pelaporan keuangan pengusaha. Dengan keberadaan SAK EMKM diharapkan pengusaha mikro, kecil, dan menengah mampu menyusun serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan usahanya. Lebih lanjut, laporan keuangan yang akuntabel dan komprehensif akan lebih cepat menarik kepercayaan pemodal. Dengan begitu, mereka akan lebih terbantu dari sisi pendanaan dan mampu meningkatkan kapasitas usahanya. Tidak

lupa, laporan keuangan juga menjadi salah satu lampiran esensial dalam pelaporan pajak



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual